

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik (Parpol) adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan di dalam pemilihan umum. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, partai politik adalah instrumen penting dalam kehidupan politik. Aksioma yang berlaku, tak ada sistem politik yang berjalan tanpa partai politik kecuali sistem politik otoriter dimana raja atau penguasa dalam menjalankan kekuasaannya sangat bergantung kepada tentara dan polisi. Di parlemen misalnya para anggota parlemen dipilih rakyat melalui mekanisme pemilu yang dijalankan partai politik. Kekuatan partai politik juga yang menentukan hampir sebagian besar proses kepemimpinan di Indonesia termasuk pemilihan presiden Indonesia dan pemimpin lembaga negara lainnya.

Terminologi partai politik dalam ruang keilmuan sangat banyak dan beragam. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budiardjo, 2009: 404).

Dalam perspektif lain, partai politik dianggap sebagai keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pengecualiannya hanya pada masyarakat tradisional yang sistem politiknya otoritarian yang pemerintahannya bertumpu pada tentara atau polisi. Sebagai

organisasi, parpol bertujuan mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai (Roy C. Macridis dalam Amal Achlasul: 1996).

Sementara, dalam Islam istilah partai politik baru dikenal pada masa modern ini, yakni ketika Muslim bersentuhan dengan sistem demokrasi. Sebelum ada partai politik, di dunia Islam sudah ada terlebih dahulu lembaga politik bernama *Ahl Al-Hall Wa Al 'Aqd*. Lembaga ini berisi orang-orang berilmu, berintegritas dan punya otoritas untuk mengambil keputusan politik di lingkungan pemerintahan. Menurut Al-Mawardi, tugas utama lembaga ini adalah meneliti dan menguji calon-calon pemimpin yang diajukan. *Ahl Al-Hall Wa Al 'Aqd* pertama kali dibentuk pada masa akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Umar menunjuk enam orang sahabat, agar satu orang diantara mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan lima orang sisanya. Dalam perjalanannya lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al 'Aqd* ini tidak ada lagi secara permanen di zaman Usman, begitu juga di zaman Ali bin Abi thalib keberadaannya semakin kabur. Hal ini disebabkan situasi politik yang dihadapi Ali pada waktu itu. Lalu pada era dinasti Umayyah dan Abbasiyyah lembaga ini sudah hilang karena corak pemerintahan berubah menjadi kerajaan. (Republika, edisi 29 januari 2009).

Di akhir abad 20, istilah *Ahl Al-Hall Wa Al 'Aqd* muncul kembali di Iran tapi dengan nama *Dewan Mashlahat*. Dewan ini dipilih oleh rakyat dan merekalah yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan Imam selaku penguasa spiritual di Iran. Pasca Runtuhnya Imperium Ustmani dan Umat Islam mengenal demokrasi, maka munculah partai politik. Dari berbagai sumber yang peneliti himpun, di Timur-tengah partai politik yang pertama kali muncul adalah Partai Ba'ath di Damaskus yang didirikan Michel Aflaq pada 1940. Lalu diikuti Jama'at al-Islamy di Pakistan bentukan Abu A'la al-Maududi

pada 21 Agustus 1941. Kemudian tahun 1953, Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir dengan maksud melanjutkan kembali kehidupan Islami di bawah Khilafah Islamiyah. Di Aljazair ada Front Pembebasan Nasional yang dibentuk pada 1954 dan Partai FIS yang berdiri pada 1989. Adapun di Indonesia, gerakan politik nasional yang pertama kali muncul adalah Sarekat Dagang Islam (tahun 1911) yang akhirnya berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Menurut Syafi'i Ma'arif, Sarekat Islam sejak semula adalah gerakan politik. Sejak awal keberadaannya Sarekat Islam mendapat sambutan positif dari rakyat, dalam tempo singkat Sarekat Islam berkembang dengan cepat karena sifat keanggotaan Sarekat Islam terbuka untuk setiap orang tanpa memandang latar belakang sosio-etnis mereka.

Selama Jepang menjajah Indonesia, seluruh kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang sudah membentuk Partai Masyumi. Partai Masyumi ini didukung oleh dua ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Namun dalam perjalanannya, para pendukung Masyumi keluar satu persatu. Bermula dari keluarnya PSII tahun 1947, kemudian NU tahun 1952 sehingga mengakibatkan posisi kekuatan Islam lemah dalam politik nasional. Pada pemilu 1955 secara nasional Masyumi menduduki urutan kedua setelah PNI. Masyumi bisa dikatakan sebagai "*All Indonesian Party*" karena memenangkan perolehan suara di 10 dari 15 daerah pemilihan yang berhasil melaksanakan pemilu. Tetapi satu hal yang sulit dibantah dalam pemilu 1955 kekuatan Islam terpecah pecah jadi 6 partai, meskipun begitu dalam hal memperjuangkan negara berdasar Islam mereka bersatu. Hal ini juga makin diperparah dengan diberlakukannya ideologi Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM) pada masa Demokrasi Terpimpin. Hanya 3 partai saja yang setuju dengan Nasakom yakni PNI, NU dan PKI. Sedangkan Masyumi yang tidak setuju dengan gagasan itu dianggap sebagai kontra revolusi. Sehingga Masyumi di Bubarkan oleh Sukarno tahun 1960. Dengan bubarnya Masyumi praktis kekuatan politik Islam terpinggirkan dari pentas politik nasional.

Memasuki masa Orde Baru, sebenarnya Umat Islam mempunyai harapan yang besar yaitu akan kembalinya Masyumi. Ternyata harapan itu hanya tinggal harapan. Sebab rezim Orde baru tidak membolehkan Masyumi tampil kembali sebagai partai politik. Sebagai gantinya, pada 5 Februari 1968 rezim Orde baru mengizinkan berdirinya Parmusi dengan syarat tokoh eks Masyumi dilarang memegang jabatan penting dalam Parmusi. Guna mencegah munculnya Neo-Masyumi.

Tindakan pemerintah tak hanya sampai disitu. Demi alasan stabilitas politik sebagai prasarat pembangunan ekonomi, Orde baru kemudian melakukan restrukturisasi kepartaian (fusi). Akibatnya jumlah partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Proses marginalisasi yang dilakukan rezim Orde baru ternyata terus berlanjut, yaitu dengan diberlakukannya asas tunggal Pancasila. Akhirnya PPP, sebagai benteng terakhir kekuatan politik Islam, menanggalkan asas Islam dan menggantinya dengan asas Pancasila.

Memasuki tahun 1900-an, muncul dan berkembang pesat gerakan-gerakan Islam di luar Muhammadiyah, Persis, NU maupun ICMI, seperti gerakan Tarbiyah yang kemudian menjelma menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Hidayatullah (19), Laskar Jihad, dan Salafi.

Ketika usai reformasi 1998, terjadi perubahan fundamental dalam perpolitikan Indonesia. Pemilu 1999 diikuti setidaknya 49 parpol dimana terdapat 8 parpol Islam. Hasil Pemilu 1999, PKB mendapatkan 61 kursi (12,6%), PPP 58 kursi (10,7%), PAN 35 kursi (7,1%), PBB 13 kursi (2%), PK 7 kursi (1,5%), Partai Nahdatul Ummah 5 kursi atau 1%, serta 3 partai Islam lain yang memperoleh kursi masing-masing 1 kursi, yaitu Partai Kebangkitan Ummat, Partai Syarikat Islam serta Partai Masyumi sehingga berjumlah 3 kursi atau 0,64 %. Sedangkan total

perolehan kursi partai Islam dan partai berbasis massa Islam adalah 171 kursi (37 %).

(Dhurorudin Mashad, 2008:207)

Pada pemilu 2004, PKB mendapatkan 62 kursi (10,57%), PPP 58 kursi (8,15%), PKS 45 kursi (7,34%) dan PAN 42 kursi (6,44%). Total perolehan suara partai Islam dan yang berbasis Islam adalah 32 %. Perubahan peta politik ini khususnya dalam partai politik Islam disebabkan persoalan konflik internal yang semakin membesar. PKB mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan karena dianggap bertentangan dengan kebijakan Abdurrahman Wahid selaku Ketua Dewan Syuro. PAN mengalami nasib serupa, dimana Sutrisno Bachir dan Hatta Radjasa saling memperebutkan kekuasaan.

Hasil pemilu 2009 dapat dikatakan pemilu terburuk, sebab partai politik Islam terlempar dari posisi 3 besar. PKS mendapatkan 51 kursi (7,88%), PAN 42 kursi (6,01%), PPP 35 kursi (5,32%) dan PKB 26 kursi (4,94%). Total perolehan suara partai Islam dan berbasis Islam sebesar 24 %. Sedangkan pada pemilu terakhir, yakni pemilu 2014, PKS hanya memperoleh 40 kursi (6,79 %) dan total perolehan suara partai Islam sebesar 31 %.

Menurunnya dan stagnerannya perolehan suara parpol Islam mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia lebih tertarik mendukung partai yang berbasis nasionalis seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Gerindra walaupun sebagian besar pemilih adalah umat Islam. Sehingga muncul pertanyaan, apakah hal ini memperlihatkan bahwa kultur Politik Islam Indonesia bersifat khas sehingga tidak terlalu mengedepankan simbol-simbol Islam atau sebenarnya kondisi ini menunjukkan kelemahan partai politik Islam itu sendiri yang pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya dukungan masyarakat Indonesia.

Realitanya memang, terdapat persoalan-persoalan yang terjadi pada partai politik Islam dan parpol berbasis Islam yang sedikit banyak berdampak terhadap rendahnya perolehan suara, walaupun persoalan tersebut juga terjadi di partai politik berbasis nasionalis. Secara umum, hampir dapat dikatakan konflik sudah menjadi bagian penting dalam partai politik Islam dimana menjelang Pemilu atau pergantian kepemimpinan partai, konflik politik internal selalu bermunculan. Ketika momentum pergantian kepemimpinan partai, parpol Islam disibukkan mengurus konflik internalnya sehingga berujung kepada kepemimpinan ganda (dualisme kepemimpinan). Akibat konflik itu tentunya berpengaruh kepada citra politik Islam di Indonesia secara keseluruhan. Kenyataan itu juga seakan membenarkan asumsi bahwa sejarah politik Islam Indonesia adalah sejarah konflik dan perpecahan, sehingga konsep ukhuwah selalu gagal diterjemahkan dengan baik. Kita masih menilai wajar jika terjadi konflik di zaman Orde Baru, sebab ada intervensi kekuasaan dalam setiap forum suksesi parpol. Tapi pada situasi sekarang, konflik parpol Islam menandakan kegagalan pengurus partai dalam mengelola manajemen konflik secara sehat dan dewasa (Anas Urbaningrum: 2006)

Dalam analisisnya, Anto Djawamaku (2005) menilai sumber konflik dalam parpol termasuk parpol Islam disebabkan tiga persoalan krusial. *Pertama*, parpol tidak memiliki platform jelas sehingga tidak adanya ikatan ideologis di antara anggotanya. Dampaknya parpol mudah terpecah belah ketika terjadi perbedaan pandangan antar anggotanya.

Kedua, adanya faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Mayoritas parpol di Indonesia termasuk parpol Islam sangat mengandalkan figuritas para pemimpinnya sehingga menciptakan ketergantungan yang kuat, ketika pemimpin itu sudah tiada, parpol Islam kehilangan sosok figur penggantinya akibat lambannya proses regenerasi. Beberapa figur tokoh parpol yang cukup melekat di mata masyarakat adalah Abdurrahman Wahid (PKB), Amien Rais (PAN), Yusril Ihza Mahendra (PBB), Hamzah Haz (PPP) dan lainnya.

Kuatnya pengaruh figur seorang pemimpin memiliki efek yang kurang baik yakni lemahnya regenerasi kepemimpinan dalam parpol.

Ketiga, parpol gagal menjalankan reformasi dan regenerasi kepemimpinan karena figur pemimpinnya menjadi simbol institusi. Partai Bulan Bintang sampai sekarang masih identik dengan Yusril Ihza Mahendra, meski sudah tidak menjabat sebagai ketua umum, peran Yusril masih menonjol dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan strategis partai yang mengklaim pewaris Masyumi tersebut. Keinginan itu bahkan tampak terlihat dalam beberapa waktu belakangan, dimana Yusril masih menjadi “jagoan” PBB dalam pertarungan kepemimpinan nasional Indonesia untuk lima tahun mendatang. Kegagalan regenerasi menandakan belum efektifnya kinerja parpol dalam menjalankan proses rekrutmen di masyarakat. Buruknya rekrutmen belakangan semakin diperparah dengan kemalasan parpol menjalankan pengkaderannya dan mengandalkan pola kaderisasi instan dengan merekrut kalangan artis dan publik figur yang kompetensi politik dan keilmuannya layak dipertanyakan.

Menurut Nurcholish Madjid dalam Anto Djamawaku (2002), perpecahan dalam parpol sampai saat ini disebabkan belum ada kedewasaan berpolitik. Perpecahan partai politik umumnya disebabkan oleh egoisme politik yang begitu besar yang merupakan indikasi ketidakdewasaan partai tersebut. Ketidakdewasaan partai juga ditunjukkan dengan ketidakberanian partai politik terkait untuk menjadi independen. Ketidakdewasaan ini mudah terjadi, sebab penguasaan sumber daya politik memang cenderung bagaimana mengejar kekuasaan. Fenomena ini mudah terlihat pada PKB yang terpecah dua antara faksi Muhaimin Iskandar (PKB) dan Yenny Wahid (PKB-Indonesia), terpecahnya PAN antara faksi Faisal Basri dan AM Fatwa dan kasus PKS antara faksi keadilan (Hidayat Nur Wahid) dan kesejahteraan (Anis Matta). Sedangkan Charles F Andrain dalam Dhurorudin (2008)

menjelaskan bahwa fragmentasi partai politik berasal dari tiga hal utama, pertama, perbedaan nilai, kedua perbedaan dalam pemaknaan kebijakan umum dan ketiga persaingan kepentingan.

Berdasarkan uraian perkembangan dan perjalanan parpol Islam di Indonesia, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu partai politik berasaskan Islam, yakni Partai Keadilan Sejahterah (PKS) yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK).

Jika ditelaah dalam sejarahnya, PKS muncul dari perkembangan kelompok gerakan Islam yang tidak mencerminkan karakteristik Nahdiyin atau Muhammadiyah. Kelompok gerakan Islam ini banyak mengadopsi pembinaan model Al-Ikhwan Al-Muslimun. Hal ini erat kaitannya dengan masuknya pengaruh pemikiran-pemikiran Hasan Al-Banna di kalangan aktivis dakwah kampus yang masuknya di Indonesia dipelopori oleh M. Natsir secara pribadi dan Dewan Dakwah Indonesia secara kelembagaannya. M. Natsir sebagai mantan ketua partai politik Islam terbesar pada zaman Orde Lama tergerak untuk mengadakan pengkaderan kepada generasi muda Muslim yang merupakan cikal bakal gerakan dakwah kampus. Hal ini didasari oleh pemikirannya bahwa dalam konteks dakwah di Indonesia, ada tiga fondasi kekuatan umat Islam dan itu selamanya harus dijaga dan dikembangkan, yaitu dunia pesantren, masjid dan kampus. Untuk menyemarakkan dakwah kampus, maka didirikanlah masjid-masjid yang berdekatan dengan kampus dengan prakarsa dari Dewan Dakwah. Hal lain yang juga dilakukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan dakwah ini adalah menerjemahkan buku-buku yang ditulis oleh kalangan Al-Ikhwan Al-Muslimun maupun Jema'at Islami (dari Pakistan) ke dalam bahasa Indonesia oleh para alumnus Timur Tengah.

Selanjutnya, metode dakwah melalui pembinaan ini dilaksanakan di kampus atau masjid yang menonjol kegiatan ke-Islamannya, antara lain Masjid Arief Rahman Hakim di kampus Universitas Indonesia (UI), Masjid At-Taqwa di kampus Institut Kejuruan dan Ilmu

Pendidikan (IKIP) Rawamangun Jakarta, Masjid Salman di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Jamaah Shalahudin di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Masjid Al-Falah di Surabaya. Perkembangan kelompok *tarbiyah* ini bisa dikatakan sangat cepat, tak sampai 10 tahun sejak gerakan dakwah digulirkan yaitu medio 1990-an, jaringannya sudah ada hampir di semua universitas maupun kantor-kantor pemerintahan. Diakui oleh para kader perintisnya, ekspansi yang dilakukan itu menggunakan sistem semacam Multi Level Marketing (MLM), yaitu 1 orang kader membina minimal 5 orang baru dalam pengajian dan itu terjadi di hampir semua universitas. Namun demikian tetap saja ada kritikan mengenai pola *tarbiyah* yang demikian, yaitu bagaimana mungkin membina jamaah besar kalau yang mengaji hanya 5-10 orang saja, tidak seperti pengajian biasa yang sekali pengajian jumlahnya bisa ribuan. Adapun untuk menjawab kritik semacam itu dapat dibuktikan dengan mengatakan bahwa dengan punya jamaah ribuan belum tentu bisa muncul dalam jumlah sebesar itu bilamana suatu waktu dibutuhkan, sedangkan *halaqah-halaqah* (perkumpulan-perkumpulan) kecil ini jumlahnya bisa menjadi ribuan saat diperlukan (Aay Muhamad Furkon, 2004 : 126-133).

Sifat kelembagaan dari kelompok *tarbiyah* ini adalah patron-klien yang artinya hubungan antar para pelaku dakwah ini diatur dalam suatu strata yang ketat dan menggunakan pola patron klien. Intensitas keterlibatan seorang pegiat dalam “lingkaran” dakwah ini diatur dalam sebuah tata kerja yang rapi, yaitu bagi pendatang baru hanya akan bertemu dengan pendakwah seniornya dari lapis terluar, begitu seterusnya hingga pada pendakwah yang paling senior atau yang berada di “pusat”. Adapun ciri-ciri kepribadian para anggota kelompok *tarbiyah* (aktivis dakwah) ini dapat dilihat dari penampilan mereka yang sederhana, sopan, rendah hati (tawadu’), rajin beribadah dan menegakkan hal-hal yang dianggap sunah. Berbagai kelompok *halaqoh* yang melakukan *tarbiyah* ini (ada yang

menyebutnya kelompok *usroh*, walau sebenarnya terdapat perbedaan arti menurut penjelasan Aay Muhammad Furkon adalah cikal-bakal dari Partai Keadilan (Sejahtera).

Ada beberapa faktor yang membuat peneliti tertarik meneliti PKS, pertama, PKS lahir dari *mainstream* politik Islam baru di Indonesia yang mulai terbentuk di era 1990-an, kedua, PKS pernah mengalami pasang surut perolehan suara hingga partai tersebut pernah terlempar dari kompetisi pemilihan dan harus kembali hadir dengan wajah baru pada pemilu berikutnya, ketiga, PKS menurut pengamatan peneliti memiliki pola dan dasar-dasar pengelolaan partai yang relatif berbeda dengan parpol Islam lainnya.

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang lahirnya PKS, peneliti akan menggali informasi dan menganalisis tentang nilai-nilai Islam yang dijadikan dasar dalam mengelola partai. Sebagai partai yang menggunakan label dan atribut Islam serta mewakili kepentingan kaum mulimin, partai Islam harus mendasarkan seluruh program dan kegiatan organisasinya minimal pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. berpedoman pada nilai-nilai universal Al-Quran dan As-Sunnah. Segala keputusan organisasi tidak boleh bertentang dengan sumber ajaran utama Islam. Kedua sumber ajaran Islam tersebut memuat nilai-nilai universal yang mencakup segala kehidupan manusia di bumi.
- b. musyawarah. Setiap keputusan-keputusan organisasi harus melalui koordinasi dan komunikasi dengan segenap pengurus yang berwenang.
- c. berlaku adil. Setiap pimpinan dan anggota memiliki hak yang sama sesuai aturan yang berlaku masing-masing partai. Oleh karena partai harus membuat keputusan dengan adil untuk sebuah keputusan sehingga tidak merugikan satu pihak dan pihak lain.

Artinya walaupun keputusan itu berdampak terhadap ruginya salah satu pihak, namun pengambilan keputusan sesuai aturan dan berpihak pada banyak pihak.

- d. toleransi.perbedaan adalah fitrah setiap manusia dan merupakan anugrah dari yang Maha Kuasa. Dengan perbedaan pula kehidupan menjadi indah dan beragam. Namun perbedaan tersebut harus dikelola dengan baik dan bukan malah menimbulkan perpecahan. (Ridho Al-Hamdi. 2013:10)

Berdasarkan pendapat Al Hamdi tersebut, sebuah partai politik yang sudah mendeklarasikan diri sebagai partai Islam, maka menjadi kewajiban bagi anggota partainya untuk memmanifestasikan nilai-nilai Islam dalam menjalan roda keorganisasian. Selain beberapa parameter tersebut diatas, peneliti akan menambahkan tiga parameter untuk mengukur manifestasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan partai, yaitu nilai/ prinsip kebebasan, persamaan dan keseimbangan.

Ke-enam parameter tersebut merupakan bagian dari fondasi nilai-nilai Islam dalam menjalankan kehidupan berpolitik termasuk dalam sistem kepartaian. Nilai-nilai Islam tersebut dituangkan dalam kitab suci Al-quran dan Sunnah Rasul..

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa partai politik yang berbasis Islam belum mampu menunjukkan pengelolaan dan manajemen partai yang baik, sehingga dari sisi internal selalu terjadi persoalan. Faktor ini tentu dapat diasumsikan sebagai faktor mendasar yang menyebabkan kurang populernya parpol Islam dimata masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya perubahan yang drastis dalam pengelolaan partai politik. Dalam perspektif Islam, sebenarnya Islam sudah sangat jelas dan tegas menerangkan bagaimana fondasi menjalankan kegiatan politik. Persoalan selanjutnya adalah sejauhmana pemahaman dan konsistensi orang-

orang partai menerapkan acuan yang sudah ada tersebut. Dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : *“Bagaimanakah manifestasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung ?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam pengelolaan partai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wacana bagi perkembangan ilmu politik khususnya mengenai manajemen pengelolaan partai politik dalam persfektif Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai referensi salah satu partai politik Islam dalam pengelolaan partai politik.